

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020.

Hadhikusuma, Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Perkasa, 2005.

Hadjon, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995.

Hariyani, Iswi, R Serfianto Dibyo Purnomo, Citra Yustisia Serfiyani, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.

HS, Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

Kansil, CST, Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014.

Makhfudz, M, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.

Marbun, Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2011.

Miru, Ahmad, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Press, 2008.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Koperasi*, Bandung, Penerbit Alumni, 1982.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2020.

Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003.

Pachta W, Andjar, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, 2007.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Dian Rakyat, 1985.

Samadani, Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2013.

Sari, Elsi Kartika, Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, PT Grasindo, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 1990.

Sumardjono, Maria S.W., *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2019.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, PT Rajawali Pers, 2022.

Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Tjandra, W. Riawan *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, 2008.

Untung, Budi, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta, Andi, 2005.

Utrecht, E, *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 715)

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi

C. Jurnal

Permana, I Gede Angga, *et al*, “Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum”, *Jurnal Education and development*, Vol. 9, No. 2 (Agustus 2021)

Prananingrum, Dyah Hapsari, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum”, *Refleksi Hukum*, Vol 9, No 1, (2014).

Putrijanti, Aju, Lapon T Leonard, dan Kartika Widya Utama, ” Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”, *Mimbar Hukum*, Vol 30, No 2 (Juni 2018).

Ratangin, Muhammad Gondo, “Pergeseran Kekuatan Akta Autentik Serta Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)”, *Lex Renaissance*, Vol 2, No 1, (Januari 2017).

Ruslina, Elli, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 9, No 1 (Maret 2012).

Thayf, Hendragunawan S, Supartiningsih, dan M. Mukhtasar Syamsuddin. “Koperasi Sebagai Harapan Perekonomian Masa Depan”, *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol XIII, No 1 (Maret 2022).

D. Internet

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narasumber>

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Perubahan Koperasi”, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perubahan_koperasi.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Perubahan Koperasi”, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perubahan_koperasi.

Ditjen AHU, “Penyelenggaraan Sistem Administrasi Badan Hukum yang Efektif dan Investment-Friendly”, <https://www.usulan.info/wp-content/uploads/2018/05/dirjen-ahu-penyelenggaraan-sistem-administrasi-badan-hukum-yang-efektif-dan-investment-friendly.pdf>.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, “Data Koperasi”,
<https://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=4A9EA17C-0C35-464C-B3AB-FA3E3AC7F14E>.

Kementerian Investasi/BKPM, “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020”, <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>.

Humas Ditjen AHU, Peningkatan Investasi Melalui Reformasi Birokrasi (Wawancara dengan Dirjen AHU), <https://portal.ahu.go.id/id/detail/31-article/191-peningkatan-investasi-melalui-reformasi-birokrasi-wawancara-dengan-dirjen-ahu>.

E. Hasil Penelitian

Muhaimin, “Kajian Kelembagaan dan Kepatuhan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.